

TARJIH DALAM PENDEKATAN ILMU-LMU SOSIAL: MENGUPAYAKAN PRAKTEK INTERDISIPLINER DALAM BERTARJIH

Oleh : Ishomuddin¹

“Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah-lah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah-lah yang melempar” (al-Anfal, 17)

“Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi” (al-Qashash 77).

“Dan katakanlah: “kebenaran itu datanganya dari Tuhanmu; maka barang siapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir” (al-kahfi 29).

Pendahuluan

TULISAN dalam makalah ini mungkin kurang relavan secara langsung dengan topik seminar yang bertajuk “antara purifikasi dan dinamisasi” akan tetapi jika diambil “ruh” nya barangkali dapat untuk dijadikan pertimbangan sebagai bahan “berijtihad” dalam bertarjih. Pembahasan dimulai dari sejarah dan perkembangan ilmu termasuk ilmu sosial, perspektif sosiologis mengenai perilaku manusia, dan hubungan antara kelembagaan Majelis

¹ Full Professor di bidang Sosiologi Masyarakat Islam pada Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang.

Tarjih dengan peran individu (anggota/pengurus/partisipan). Dengan memahami sedikit uraian ini diharapkan akan menambah wawasan untuk mengembangkan metode dan epistemologi tarjih sehingga mendapatkan ketentuan hukum yang tepat dan kontekstual.

Pertama, sejarah ilmu termasuk sosiologi dan budaya yang kita warisi tidaklah muncul begitu saja (*taken for granted*) atau terberi (*given*). Perdebatan dan kajian-kajian yang dilakukan oleh manusia sepanjang sejarah melahirkan konstruksi-konstruksi ilmu pengetahuan dan pemilihan-pemilihan yang terus menerus berkembang. Berawal dari satu kesatuan ilmu kemudian terderivikasi ke dalam ilmu-ilmu yang berbeda-beda karena kebutuhan menjawab-permasalahan sosial dengan menggunakan metode-metode yang berbeda.

Namun demikian di dalam perkembangannya, keragaman ilmu yang ketat (*rigid*) ternyata cukup dirasakan menyulitkan kaum intelektual dalam merumuskan suatu solusi yang komprehensif dan menyeluruh. Kondisi semacam inilah selanjutnya ada upaya-upaya secara intensif untuk menyatukan kembali atau paling tidak ilmu saling menyapa dan berdialog satu sama lain sebagaimana diprovokasikan dan diupayakan oleh, sosiolog Amerika, Immanuel Wallerstein². Ia ingin mengubah perspektif para ilmuwan dalam melakukan kajian-kajian mengenai sosial, ekonomi dan

²Immanuel Wallerstein, ketua Komisi, Sosiologi, Amerika Serikat. Direktur Fernand Braudel Center for the Study of Economies, Historical Systems, and Civilizations, dan Profesor Sosiologi, Binghamton University; Presiden International Sociological Association; pengarang *Modern World-System* (3 jilid); *Unthinking Social Science*.

politik. Ia mengajukan perlunya pemahaman yang menyeluruh dalam memahami peristiwa-peristiwa sosial yang terjadi di masyarakat. Perspektif yang dibangun oleh Wallerstein kemungkinan juga dapat kita gunakan dalam mengamati peristiwa-peristiwa sosial-keagamaan.

Dalam konteks ini, maka kajian mengenai apa pun seharusnya dilakukan secara interdisipliner—karena persoalan-perosalan sosial dan agama tidak hanya disebabkan oleh satu sebab (*single case*), melainkan juga dipengaruhi oleh kondisi-kondisi lain seperti budaya, ekonomi, politik, pendidikan, psikologi, dan sebagainya—sehingga dapat menganalisis peristiwa dalam kaitannya dengan perilaku-perilaku manusia menggunakan pisau analisis secara tepat dan komprehensif. Dalam hal ketarjihan—merujuk/kembali kepada al-Qur'an dan sunnah—tidak hanya dalam pengertian yang sempit dan tekstual. Ruh Islam dapat pula didekati dengan praktek-praktek disiplin yang lain, seperti sosiologi, budaya, ekonomi, politik, antropologi, dan lain-lain sehingga Islam menjadi aktual dan hidup sebagaimana yang pernah dipraktikkan oleh Khulafa ur Rasyidin, filsuf-filsus zaman Abbasyiyah, dan generasi-generasi Islam seterusnya.

Kedua, mengenai manusia sebagai pelaku (aktor) kehidupannya dan/atau sekaligus objek dalam perspektif sosiologis masih terus dibahas secara ilmiah oleh para intelektual Islam dan bidang ilmu-ilmu sosial dan budaya. Pertanyaan-pertanyaan bersifat mikrostruktur, seperti bagaimana manusia bertindak? Apa yang menyebabkan manusia bertindak dan berperilaku? Faktor-faktor apa saja manusia melakukan tindakan? merupakan pertanyaan-

pertanyaan yang terus menarik di kalangan ilmuwan sosial dan agama, sebagaimana dalam pembahasan yang kontroversial dalam aliran teologi Islam, Qadariyah (*free will and free act*) dan Jabariyah (*fatalisme*).

Ketiga, mencoba melakukan analisis hubungan kelembagaan Majelis Tarjih dan peran individu (anggota/partisipan) dengan menggunakan perspektif makro, meso, dan mikro struktur sebagai ciri khas analisis sosiologis. Ketiga perspektif tersebut sangat penting untuk mengevaluasi eksistensi Majelis Tarjih dan problem serta kendala-kendala yang dihadapi dalam kegiatan bertarjih.

Interdisiplin Menuju Pemahaman Menyeluruh; Kegelisahan Seorang Sosiolog Wallerstein

Sejarah intelektual abad kesembilan belas ditandai terutama oleh profesionalisasi dan pembedaan pengetahuan ke dalam disiplin-disiplin ilmu, melalui penciptaan struktur-struktur institusional permanen, yang dirancang untuk memproduksi pengetahuan baru maupun mereproduksi para produsen pengetahuan. Ilmu diproklamasikan untuk menjadi penemuan realitas obyektif, menggunakan suatu metode yang memungkinkan kita keluar dari pikiran (*mind*). Sebaliknya para filsuf dianggap hanya merenungkan (*cogitate*) dan menulis tentang renungan-renungan (*cogitations*)

mereka saja². Tiang-tiang fondasi pembagian ilmu-ilmu sosial sudah sangat nyata mengkilap pada paruh pertama abad kesembilan belas. Namun baru pada periode 1850-1914 diversifikasi intelektual muncul dalam struktur disiplin ilmu-ilmu sosial yang dengan resmi diakui oleh berbagai universitas utama dalam bentuk sebagaimana yang kita kenal sekarang ini. Jelaslah dalam periode antara 1500 dan 1850 sudah ada kepustakaan mengenai banyak persoalan sentral yang membicarakan tentang apa yang kini kita sebut sebagai ilmu sosial.

Penciptaan beragam disiplin ilmu sosial merupakan bagian dari upaya umum abad kesembilan belas untuk melindungi dan memajukan ilmu pengetahuan “objektif” tentang “realitas” atas dasar penemuan-penemuan empiris (yang bertentangan dengan “spekulasi”). Tujuannya adalah untuk “mempelajari”, bukan menciptakan atau pun mengintuisikan kebenaran. Menjelang

²Pandangan tentang ilmu dan filsafat ini ditegaskan secara agak jelas oleh August Comte dan John Stuart Mill pada paruh pertama abad 19, ketika mereka berusaha menetapkan kaidah-kaidah yang akan mengatur analisis terhadap dunia sosial. Dalam menghidupkan kembali terminologi “fisika sosial”, Comte memperjelas perhatian politisnya. Dia berkehendak menyelamatkan Barat dari “korupsi sistematis” yang sudah merambat ke dalam aparatur pemerintahan yang sangat diperlukan”, karena “anarki intelektual” yang telah bermunculan sejak Revolusi Perancis. Dalam pandangannya, para penguasa mendasarkan diri mereka pada doktrin-doktrin kuno (Katolik dan Feodal); sementara para aktivis gerakan bertumpu pada tesis-tesis yang murni negatif dan destruktif, yang bersumber pada Protestanisme. Dalam struktur pengetahuan yang baru ini para filsuf akan mengaplikasikan logika mekanik celestial terhadap dunia sosial. Ilmu sosial diharapkan mewakili pembebasan total dari teologi dan metafisika serta semua cara-cara “penjelasan” atas realitas. Baca August Comte, *A Discourse on the Positive Spirit* (London: William Reeves, 1903), hal. 21. Rekan Inggris dan teman berkorespondensi Comte, John Stuart Mill, tidak menyebut ilmu positif melainkan ilmu eksakta. Baca John Stuart Mill, *A System of Logic Ratiocinative and Introductive*, vol. 8 of *Collected Works of John Stuart Mill* (Toronto: University of Toronto Press, 1974), buku 6, bab 3, alenia 2, hal. 846.

pecahnya Perang Dunia I, terjadilah konvergensi umum atau konsensus di sekitar sejumlah kecil nama spesifik. Nama-nama itu terutama ada lima, yaitu ilmu sejarah, ilmu ekonomi, sosiologi, ilmu politik, dan antropologi. Bagi sang penemu “sosiologi”, Comte menginginkan bahwa sosiologi harus menjadi ratu ilmu-ilmu. Sosiologi harus menjadi ilmu sosial yang terintegrasi dan menyatu, yang “positivistik”. Tetapi dalam prakteknya, sosiologi sebagai sebuah disiplin yang dikembangkan pada paroh kedua abad kesembilan belas, tidak lain merupakan hasil institusionalisasi dan transformasi di berbagai universitas. Sosiologi merupakan hasil asosiasi-asosiasi reformasi sosial, yang agenda utamanya berkaitan dengan berbagai ketidakpuasan dan kekacauan populasi kelas pekerja perkotaan yang semakin besar jumlahnya. Seperti sosiologi, antropologi pun kemudian dilembagakan sebagai sebuah disiplin universitas, tetapi disegregasikan dari ilmu-ilmu sosial lain yang mengkaji dunia Barat.³

Kini, terutama semenjak 1945, di Eropa dan Amerika Serikat sendiri pembedaan secara ketat dan kaku itu mulai ditinggalkan. Sebab, seiring dengan adanya berbagai perubahan masyarakat secara mondial, ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang tersekat-sekat secara ketat itu semakin kurang mampu menjelaskan berbagai gejala yang ada. Muncullah kajian-kajian yang bukan sekedar melibatkan berbagai disiplin ilmu atau multi disipliner, tetapi juga lintas disiplin atau interdisipliner. Pendeknya, kalau dari paroh kedua

³Immanuel Wallerstein, *Open The Social Science; Report of the Gulbenkian Commission on the Restructuring of the Social Science*, diterjemahkan Oscar (Yogyakarta: Lintas Batas Ilmu Sosial dan LkiS, 1997), hal. 20.

abad ke 19 hingga sekitar tahun 1945 terjadi divergensi ilmu-ilmu sosial dan humaniora, kini terjadi konvergensi.

Satu hal yang senantiasa perlu diingat, munculnya disiplin-disiplin ilmu yang pernah tersekat-sekat secara kaku, tetapi kini semakin bersinggungan satu sama lainnya dalam bentuk kajian-kajian atas subject matters tertentu, tidaklah lepas dari berbagai fenomena yang ada di dalam masyarakat yang terus berubah. Namun, kita sering lupa pada asal-usul dan latar belakang munculnya konstruksi-konstruksi pengetahuan itu. Kita sering berasumsi bahwa konstruksi-konstruksi pengetahuan itu seakan-akan turun dari langit, sehingga harus diterima sebagaimana adanya (*taken for granted*), terberi (*given*) dan alami (*natural*). Asumsi-asumsi seperti itu jelas a-historis, dan hanya akan membuat kita menempatkan pengetahuan beserta struktur-struktur kelembagaan yang menopangnya seperti doktrin-doktrin agama dengan institusi-institusi pendukungnya.

Upaya dekonstruksi terhadap narasi dan pendekatan-pendekatan nomotetik yang mendasarkan diri pada hukum-hukum objektif dan universal ini juga sekaligus menyerang konstruksi disiplin ilmu-ilmu sosial baku seperti yang kita lihat dewasa ini (ilmu sosial terpilah ke dalam disiplin ilmu sejarah, ilmu ekonomi, sosiologi, ilmu politik, dan antropologi, yang terbentuk dalam periode 1850-1945. Perlu kita catat, meskipun legitimasinya dipertanyakan, pada saat yang sama pemilahan ilmu sosial tersebut masih terus dipelihara. Perguruan tinggi ilmu sosial selalu pertama-tama mengajarkan kepada

mahasiswanya apa yang membedakan ilmu sosiologi dengan ilmu politik, politik dengan antropologi, dan seterusnya.⁴

Dimana Posisi Wallerstein dalam dalam percaturan tarik ulur antara kubu yang mempertahankan pendekatan obyek universal dengan kalangan pengkritiknya dari kalangan posmodernis/ poskolonialis yang sama sekali menolak adanya kebenaran tunggal yang berlaku obyektif dan universal ? Ketika banyak ilmuwan posmodernis/poskolonialis sibuk menganalisis teks, melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi, dan membuat semiotik menjadi ilmu yang hanya bisa dipahami oleh segelintir orang yang siang malam memang berkecimpung dalam subyek itu, Wallerstein, sebagai seorang sejarawan, menawarkan sebuah pendekatan jangka panjang mengenai perkembangan ilmu-ilmu sosial dari abad ke 19 sampai akhir abad ke-20.

Pendekatan sejarahnya membuat dia tidak jatuh ke salah satu kutub ekstrim dari tarik ulur tersebut. Tidak seperti kalangan posmodernis/poskolonialis yang sama sekali menolak segala sesuatu yang berkenaan dengan pendekatan nomotetik, Wallerstein mengatakan beberapa hal yang menunjukkan dia mengambil jalan tengah :

Pertama, meskipun distingsi epistemologi antara ideosinkrasi (tidak ada kebenaran tunggal) dan nomotetik (hukum obyektif dan universal) nanti akan menghilang, tetapi makna kognitifnya masih akan tetap. Dan dia tidak

⁴Alexander Irwan, "pengantar" dalam, Immanuel Wallerstein, *Open The Social Science; Report of the Gulbenkian Commission on the Restructuring of the Social Science*, diterjemahkan Oscar (Yogyakarta: Lintas Batas Ilmu Sosial dan LkiS, 1997), hal. viii.

mengatakan bahwa sudah ada solusi yang memuaskan untuk keluar dari dikhotomi idiosinkrasi-nomotetik tersebut.

Kedua, yang harus diupayakan adalah bagaimana cara menerima secara serius suatu pluralitas berbagai pandangan dunia ke dalam ilmu sosial tanpa kehilangan pendirian bahwa ada juga kemungkinan untuk mengetahui dan mewujudkan kumpulan nilai-nilai yang boleh jadi pada kenyataannya memang sama, atau menjadi sama, untuk semua humanitas. Dan pernyataan ini tampak jelas bahwa Wallerstein tidak sama sekali meninggalkan pendekatan nomotetik.

Ketiga, kita sekarang tidak berada pada momen di mana struktur disiplin yang ada telah dibongkar. Kita berada pada satu titik di mana struktur-struktur yang sedang bersaing mencoba memperjuangkan eksistensi mereka.

Jadi Wallerstein tidak memberikan usul tunggal untuk memeluk pendekatan nomotetik atau ideosinkratik. Dia menganjurkan untuk semakin meningkatkan dialog antara kedua pendekatan epistemologis tersebut, dan antara disiplin sosial yang ada. Gagasan Wallerstein ini dikenal dengan "perspektif sistem dunia" (*World-System Perspective*). Kemunculan-kemunculan disiplin baru sesungguhnya adalah produk dari dialog atau menggabungkan antara satu disiplin dengan disiplin lainnya, seperti sosiologi politik, sosiologi ekonomi, antropologi sejarah, ekonomi politik, sosiologi sejarah dan sebagainya. Jadi perkembangan ilmu-ilmu ini adalah sebagai proses sejarah sebagaimana dalam ilmu-ilmu keislaman.

Lahirnya suatu disiplin sebagai proses sejarah terjadi pada semua ilmu termasuk ilmu agama (Islam). Di dalam penelitian agama, biasanya dibedakan menjadi dua macam, pertama, Penelitian agama (*research on religion*) dan kedua, Penelitian keagamaan" (*religious research*) walaupun bisa saling mencakup. Penelitian agama, lebih mengutamakan pada materi agama, sehingga sasarannya pada tiga elemen pokok yaitu: ritus, mitos, dan magis. Penelitian keagamaan lebih mengutamakan pada agama sebagai sistem atau sistem keagamaan (*religious system*). Sasaran penelitian agama adalah agama sebagai doktrin, Sasaran penelitian keagamaan adalah agama sebagai gejala sosial budaya.

Penelitian agama Islam adalah penelitian yang objeknya adalah substansi agama Islam, yaitu: *kalam, fikih, akhlak, dan tasawuf*. Penelitian keagamaan Islam adalah penelitian yang objeknya adalah "agama sebagai produk interaksi sosial". Penelitian agama maupun penelitian keagamaan merupakan kajian yang menjadikan agama sebagai objek penelitian. Jika kita mengikuti perkembangan Islam dari masa ke masa maka kita bisa melihat bahwa Islam Syi'ah, Islam Sunny, Islam NU, Islam Muhammadiyah, dan Islam Ahmadiyah adalah Islam produk sejarah. Seluruh bangunan sejarah Islam klasik, pertengahan dan modern, adalah produk sejarah. Corak dan wajah Islam di berbagai belahan dunia adalah produk sejarah. Ilmu kalam, fiqih, Ushul fiqh, akhlak, tashawuf adalah produk sejarah. Semua itu produk sejarah dapat dijadikan sebagai objek penelitian.

Bagi Wallerstein, perspektif sistem dunia⁵ bukan merupakan teori, tetapi “sebuah protes melawan kecenderungan terbentuknya struktur pemahaman dan pengkajian ilmu sosial sejak dari lahirnya pada pertengahan abad ke-19”. Wallerstein memberikan kritik tentang tumbuh suburnya suatu metode pengkajian ilmiah, yang tidak hanya sekedar “menutup daripada menggali” banyak persoalan penting, tetapi juga ketidakmampuannya “untuk menjelaskan secara rasional berbagai kemungkinan pilihan sejarah yang pernah muncul pada masa lalu”. Secara khusus, Wallerstein merasa gelisah pada lima asumsi pokok metode pengkajian tradisional ilmu-ilmu sosial yang telah lazim digunakan selama 160 tahun terakhir.

Pertama, pembagian disiplin dalam ilmu sosial. Dalam mode pengkajian ilmiah tradisional, “ilmu sosial terbagi atas berbagai ‘disiplin’ yang secara intelektual merupakan pengelompokan yang dapat diterima oleh akal sehat dari berbagai persoalan, yang memang berbeda satu sama lain. Pembagian disiplin ini meliputi antropologi, ilmu politik, sosiologi, ekonomi, dan mungkin juga geografi, psikologi, dan sejarah. Masing-masing disiplin ini memiliki bentuk dan organ yang jelas, dalam pengertian bahwa masing-masing memiliki batas, struktur dan orang yang hendak membela kepentingan bersamanya, dalam dunia universitas maupun dalam dunia penelitian.

⁵Wallerstein, “World-System Analysis”, dalam Anthony Giddens dan Jonathan H. Turner (ed.), *Social Theory Today* (Stanford: Stanford University Press, 1987), hal. 309. Baca juga Suwarno dan Alvin Y. So, *Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1991), hal 183-190.

Berdasarkan kenyataan ini, para penganjur kajian antardisiplin berpendapat, bahwa pembahasan suatu masalah tertentu, yang secara tradisional berada dekat dalam wilayah garapan satu disiplin tertentu, akan lebih dapat diurai dan dijelaskan jika pembahasan tersebut menggunakan berbagai disiplin sekaligus. Wallerstein melihat bahwa pada perjalanan abad ke-19 muncul satu perangkat nama departemen, gelas dan asosiasi masing-masing disiplin yang kemudian kurang lebih sekitar tahun 1940-an keseluruhan perangkat tersebut dibakukan sebagai kategori seperti terlihat dan terpakai sekarang ini. Menurut Wallerstein pembagian dan pembedaan ilmu sosial semacam ini dirumuskan dengan berdasarkan diri pada ideologi liberal yang mendominasi abad ke-19. Pada dasarnya, menurut ideologi ini negara (politik) dan pasar ekonomi merupakan dua arena yang terpisah secara analitis.

Dari sudut pandang perspektif sistem dunia, Wallerstein menolak pagar disiplin ilmu yang semu ini, karena hanya menghambat proses pengembangan ilmu itu sendiri dan membatasi proses kreasi penciptaan ilmu.

Kedua, sejarah dan ilmu sosial. Menurut pemahaman tradisional, sejarah diartikan sebagai ilmu untuk menjelaskan sesuatu peristiwa yang benar-benar telah terjadi di masa lampau. Ilmu sosial dipahami sebagai perangkat kaidah universal yang diharapkan mampu menjelaskan tingkah laku manusia. Pemisahan inilah yang menjadikan sumber perbedaan dari apa yang dikenal dengan mode analisis yang memberikan perhatian utama pada

keunikan dan kekhususan (*a nomothetic method*) dan mode analisis yang memberikan perhatian utama untuk merumuskan kecenderungan umum dan kebakuan (*an idiographic method*), yang sekalipun dalam perkembangannya kemudian ada usaha untuk memadukan kedua model analisis tersebut. Dengan kata lain, sejarawan membantu ilmuwan sosial untuk mendalami dan memahami data, di sisi lain, ilmuwan sosial membantu sejarawan dengan memberikan pandangannya tentang kemungkinan-kemungkinan kecenderungan universal yang diharapkan dapat dijumpai setelah dilakukan pengamatan cermat atas peristiwa-peristiwa sejarah yang berurut dan berkait.

Wallerstein bersikap kritis terhadap pembagian kerja intelektual yang rapih ini antara yang memberikan perhatian kekhususan dan keumuman. Ia mengajukan konsep untuk menjembatani dan menyatukan keduanya, yang disebutnya sebagai media hubungan analisis generalisasi antarsejarah (*trans-historical generalizations*) dan pengisahan peristiwa kekhususan (*particularistic narrations*). Dalam aplikasinya, ia menjelaskan bahwa perspektif sistem dunia merupakan suatu alat yang hendak mencoba melakukan analisis di dalam satu kesatuan yang sistemik, dengan referensi waktu yang panjang dan dalam referensi ruang yang besar yang dianggap cukup untuk mewadahi 'perhitungan logis' dan 'kekuatan penentu' dari bagian terbesar suatu sistem terhadap bagian yang lebih kecil, dan di saat yang sama mengikuti dan memperhatikan, bahwa sistem tersebut memiliki awal dan akhir, yang oleh karena itu sistem tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai suatu yang langgeng.

Ketiga, masyarakat atau sistem yang menyebar. Kajian ilmu-ilmu sosial tradisional menganggap bahwa, “manusia akan selalu terorganisir dalam satu kesatuan yang disebut sebagai masyarakat, yang di dalamnya terdiri dari berbagai kerangka kerja sosial yang di dalamnya manusia hidup dalam kehidupannya”. Pada abad ke-19 konsep “masyarakat” ini dipertentangkan dengan konsep “negara”. Oleh karenanya, dalam perkembangan lebih lanjut, persoalan analitis utama yang dihadapi berupa usaha-usaha untuk memadukan konsep masyarakat dan negara. Jika negara dapat diamati secara langsung dari bentuk kelembagaannya, masyarakat diartikan sebagai perwujudan tingkah laku dan budaya sosial yang memiliki kelangngan yang lebih dibandingkan apa yang ada di dalam negara.

Wallerstein menyatakan bahwa sesuai dengan perkembangan waktu, batasan negara dan masyarakat menjadi tidak jelas, dan bahkan sama. Baginya negara merdeka merupakan kesatuan dasar yang menjadi prasyarat adanya kehidupan sosial yang dinamis. Ia bersikap kritis terhadap kajian ilmu sosial tradisional. Ia melangkah lebih jauh dengan memberikan batasan yang lebih jelas, tentang apa yang dimaksud dengan sistem yang menyebar. Sistem yang menyebar diartikan sebagai “sistem yang dengan segala isinya lahir, berkembang, dan mati serta timbul kembali sebagai akibat dari adanya semacam proses pembagian kerja yang terus menerus dan lebih canggih”. Dalam sejarah manusia, menurut Wallerstein ada tiga sistem yang menyebar yang pernah diketahui, yakni sistem mini (*the mini systems*),

sistem kekaisaran dunia (*the world-empires*), dan sistem ekonomi dunia (*the world-economics*).

Pada abad ke 19 merupakan sistem yang ketiga yakni ekonomi kapitalis dunia mampu berkembang pesat menyebar ke seluruh penjuru dunia dan menyerap serta memusnahkan sistem mini dan sistem kekaisaran-dunia yang pernah ada. Oleh karena itu abad ke 19 untuk pertama kalinya, dunia hanya memiliki satu sistem yang menyejarah, yakni sistem ekonomi-kapitalis dengan berbagai jaringan struktur politiknya di berbagai negara.

Keempat, batasan kapitalisme. Ilmu sosial tradisional memberikan batasan pengertian kapitalisme sebagai “sistem yang mendasarkan diri pada persaingan bebas, persaingan antara produsen bebas untuk menggunakan tenaga kerja yang juga tidak terikat untuk menghasilkan produk yang dikehendaki. Dengan kata lain “bebas” di sini mengandung pengertian ada dan tersedianya penjualan dan pembelian di pasar”. Jika ini benar, maka yang terjadi adalah bahwa norma-norma kapitalisme yang telah dirumuskan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dari sistem ekonomi dunia yang sekarang ini ada. Oleh karena itu ilmuwan sosial hendaknya mengoreksi kembali pengertian kapitalisme yang selama ini mereka gunakan.

Dengan kata lain, apa yang dipersoalkan selama ini tentang oembedaan elemen “bebas dan tidak bebas” untuk memahami pengertian kapitalisme justru bukan merupakan sesuatu yang prinsip. Dengan demikian, apa yang selama ini dianggap sebagai “perkecualian”, karena semestinya bercirikan

tunggal, berubah menjadi sesuatu yang wajar karena ternyata mewujud dengan bercirikan ganda.

Kelima, tentang gerak maju. Ilmuwan sosial tradisional memperlakukan “sejarah manusia sebagai satu gerakan maju, dan sebagai suatu perubahan yang tidak mungkin dihindari”. Nampaknya, baik teori evolusi maupun perspektif pembangunan Marxis juga menganggap gerak maju ini. Namun demikian, dalam teori sistem dunianya, Wallerstein “berkeinginan untuk menghilangkan anggapan, bahwa gerak maju sebagai arah dan lintasan yang pasti dilalui dan dicapai, dan memperlakukan perkembangan sejarah manusia sebagai suatu yang memiliki berbagai kemungkinan. Dengan berbagai kriteria yang dapat diperdebatkan, ada kemungkinan untuk dicapai keadaan yang lebih baik dan di saat yang sama juga terbuka kemungkinan untuk timbulnya keadaan yang buruk. Tidak ada kepastian bahwa sejarah manusia akan berjalan secara linear, bergerak maju, bergerak mundur, atau di tempat. Dapat saja terjadi kecenderungan gerakan yang tidak beraturan, atau bahkan timbul ketidakpastian.

Oleh karena dunia dilihat sebagai suatu yang pernah mewujud dalam berbagai ragam dan bentuk sistem, dan jika sistem-sistem tersebut memiliki awal dan akhir, yang terjadi kemudian adalah kehendak untuk mengetahui proses bagaimana terjadinya pergantian sistem tersebut, dalam lingkup ruang dan waktu. Dalam konteks ini Wallerstein berkesimpulan bahwa sekarang ini umat manusia hidup dalam masa transisi yang panjang. Sebuah masa yang tidak lagi menyediakan kesempatan bagi kontradiksi-kontradiksi tata

ekonomi kapitalis dunia untuk melakukan penyesuaian. Jika demikian halnya, sekarang ini umat manusia berada dalam periode kritis, periode untuk menentukan pilihan arah lebih lanjut dari sejarah umat manusia. Dan dalam konteks ini, “analisis sistem dunia mengajak untuk membangun satu ilmu sejarah sosial yang menyadari dan memahami unsur ketidakpastian dari masa transisi ini, dan oleh karena itu ilmu sejarah sosial ini diharapkan mampu memberikan sumbangannya tentang bagaimana proses transformasi dunia ini terjadi dengan memberikan petunjuk pilihan-pilihan yang tersedia, dengan tanpa memberikan ajakan untuk mendukung kepercayaan akan kepastian kemenangan dari yang baik atau pencapaian keadaan yang lebih baik.

Madzab-madzab Mengenai Perilaku Manusia

Manusia adalah makhluk sosial. Apakah kita suka atau tidak, hampir semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita berkaitan dengan orang lain. Sedikit sekali yang kita lakukan benar-benar soliter dan sangat jarang kesempatan kita benar-benar hanya sendirian. Jadi, kajian mengenai bagaimana kita dapat berinteraksi satu sama lain dan apa yang terjadi ketika kita berinteraksi, adalah salah satu ikhwal paling mendasar yang menarik dalam kehidupan manusia. Cukup aneh barangkali, belum terlalu lama berselang—sejak kira-kira permulaan abad ke-19 dan seterusnya—suatu minat khusus dalam aspek sosial keberadaan manusia yang intrinsik ini digarap secara serius.

Sebelum masa itu, dan bahkan setelah itu, lapangan minat lain mendominasi analisis kehidupan manusia. Dua pendekatan non-sosial mengenai perilaku manusia yang paling bertahan lama adalah eksplanasi “naturalistik” dan “individualistik”.

Ketimbang memandang perilaku sosial sebagai produk interaksi, teori-teori ini memusatkan perhatian pada kualitas alamiah yang terkandung dalam individu manusia. Di satu pihak, eksplanasi naturalistik berpendapat bahwa semua perilaku manusia – termasuk interaksi sosial – adalah produk disposisi yang diwariskan yang kita miliki sebagai makhluk binatang. Sebagaimana hewan, manusia diprogram secara biologi oleh alam. Di pihak lain, eksplanasi individualistik mendorong dibangunnya generalisasi besar mengenai perilaku yang pasti. Dari sudut pandang ini kita semua adalah “individual” dan “berbeda”. Dengan demikian eksplanasi mengenai perilaku akhirnya harus terletak pada kualitas psikologis yang khusus dan unik dari individu. Teori-teori sosiologi mempunyai posisi kontras yang langsung dengan pendekatan-pendekatan ‘non-sosial’ ini.

Untuk sedikit memahami dua teori tersebut di atas, saya akan memberikan gambaran dan contoh supaya pemahaman kita lebih jelas, terutama jika pendapat teori-teori tersebut dihubungkan dengan konsep dan doktrin Islam sebagai agama yang mengatur kehidupan manusia yang beriman baik sebagai makhluk individual, fithrah, maupun sosial. *Pertama*, Eksplanasi *naturalistik* mengenai aktivitas manusia cukup banyak diketahui. Misalnya, dalam masyarakat kita hidup anggapan bahwa adalah alamiah bagi laki-laki

dan perempuan saling jatuh cinta, menikah dan mempunyai anak, ingin kaya dan membangun rumah mewah. Adalah alamiah mereka hidup dalam keluarga inti, dengan suami pergi bekerja untuk mencari nafkah bagi isteri dan anak-anaknya, sedangkan isteri adalah ibu yang bertugas memelihara anak-anak di rumah khususnya ketika anak-anak masih kecil. Jika anak-anak beranjak besar, alamiah pula jika mereka tetap tinggal bersama orang tua yang bertanggung jawab terhadap mereka sekurang-sekurangnya hingga remaja. Setelah itu, alamiah pula jika mereka ingin meninggalkan “sarang”, untuk mulai menemukan jalan kehidupan mereka sendiri, khususnya mencari pasangan hidup. Seperti orang tua mereka, anak-anak akan menikah dan membangun keluarga sendiri.

Model eksplanasi “alamiah” ini menyebabkan praktek yang berlawanan seperti tidak mau menikah, atau menikah karena alasan lain yang bukan cinta, menjadi tidak alamiah. Juga, tidak alamiah, orang-orang yang menikah tapi tidak mau mempunyai anak, atau para isteri yang tidak mau menjadi ibu yang memelihara anak-anaknya. Tidak alamiah anak yang belum berusia 18 tahun meninggalkan rumah, atau sudah dewasa tetapi tidak mau meninggalkan rumah untuk membangun keluarga sendiri. Namun dalam masyarakat Barat keinginan dan praktek yang “tidak alamiah” ini cukup biasa. Cukup banyak orang-orang yang tidak menikah atau hidup bersama tanpa menikah. Cukup banyak wanita yang tidak setuju dengan gagasan menjadi ibu, dan juga banyak wanita yang tidak mau sepanjang hayat menjadi ibu rumah tangga saja. Banyak anak-anak yang meninggalkan

keluarga sebelum berusia 18 tahun, dan sebaliknya banyak pula yang tetap tinggal bersama keluarga meski sudah berusia lebih 18 tahun.

Pertanyaannya adalah, mengapa demikian? Jika perilaku manusia adalah produk disposisi yang melekat (terkandung) secara alamiah pada manusia lalu mengapa ada penyimpangan yang cukup besar jumlahnya itu? Kita dapat menggambarkan cukup tersebarunya pola-pola kelakuan yang “tidak alamiah itu hingga dalam skala besar. Lalu, mengapa terdapat banyak variasi dari konsep praktik keluarga “normal” pada berbagai masyarakat yang lain? Dalam perspektif ilmu sosial ternyata setiap kelompok kehidupan masyarakat sebagaimana yang pernah dilakukan oleh para antropolog, memperoleh penjelasan kenyataan yang kontras dalam kehidupan keluarga. Phillippe Aries dalam bukunya , *Centries of Childhood* (1973), menggambarkan tentang konsep dan praktik perkawinan, keluarga, dan pengasuhan anak dalam kehidupan keluarga Eropa Kuno sangat berlawanan secara tajam dengan konsep Barat mengenai apa yang disebut “normal”. Keluarga bukanlah satuan sosial yang bersifat pribadi dan terisolasi, terputus secara sosial, dan terpisah secara fisik dari dunia secara luas. Tetapi keluarga terikat erat dalam komuniti, dengan orang-orang secara esensial hidup publik, bukan pribadi. Mereka hidup dalam rumah tangga yang komposisinya terus-menerus bergeser; kerabat, teman-teman, anak-anak, tamu-tamu, orang-orang yang sekedar singgah, dan juga hewan piaraan semua tidur di bawah atap yang sama.

Perkawinan terutama menjadi alat untuk membangun aliansi bukan hasil hubungan cinta, sehingga wanita tentu saja tidak memandang “menjadi ibu” sebagai takdir yang harus ditanggung sendiri (*ascribed status*). Jelaslah bahwa pengasuhan anak bukan beban berat dibandingkan dengan masyarakat kita (beragama). Lebih banyak orang terlibat dalam mengasuh anak – baik kerabat maupun komunitas secara keseluruhan. Masa kanak-kanak berlangsung lebih pendek daripada masa kini. Seperti dikemukakan oleh Aries (1973) “tak lama setelah disapih, anak secara alamiah menjadi teman orang dewasa”.

Kedua, adalah eksplanasi “*individualistik*”. Seberapa berguna argumentasi bahwa perilaku adalah produk perubahan psikologis individual? Teori ini sangat sering digunakan. Sebagai contoh, berhasil tidaknya pendidikan seringkali diasumsikan semata-mata cerminan dari kecerdasan; anak yang cerdas akan sukses, yang tidak cerdas gagal. Bunuh diri kerap kali dilihat sebagai tindakan orang yang tidak stabil; suatu tindakan orang yang “terganggu keseimbangan pikirannya”. Eksplanasi ini menarik bagi banyak orang dan khususnya terbukti tahan terhadap kritik sosiologi. Namun pengkajian yang lebih cermat menunjukkan bahwa eksplanasi ini kurang tepat.

Jika pencapaian pendidikan semata-mata mencerminkan kecerdasan mengapa anak-anak dari kelas pekerja menunjukkan prestasi pendidikan yang tidak kalah dari mereka yang datang dari kelas menengah? Tentu gegabah untuk mengatakan bahwa orang-orang yang berasal dari pekerjaan tertentu menunjukkan prestasi pendidikan yang lebih rendah dibandingkan

pekerjaan lain. Dengan kata lain, kecerdasan tidak bisa ditentukan semata-mata oleh jenis pekerjaan, meskipun ada benarnya bahwa pencapaian dalam pendidikan pada batas tertentu dapat dipengaruhi oleh latar belakang anak.

Penjelasan seperti di atas menunjukkan kekuarangan dari teori-teori perilaku manusia yang secara eksklusif menekankan dorongan-dorongan alamiah dari dalam diri manusia atau kondisi psikologis unik dari individu. Jika alam berada dalam akar perilaku, mengapa bervariasi menurut latar sosial? Jika kita semua adalah individu yang berbeda-beda – sebagaimana dikatakan oleh eksplanasi individual – yang bertindak mengikuti kehendak basis psikologis yang unik, mengapa kita yang berbeda-beda itu berperilaku dalam lingkungan sosial yang sama dan dengan cara yang dapat dipahami satu sama lain? Jelaslah disini ada dimensi sosial bagi keberadaan manusia, yang membutuhkan teori sosiologi untuk menjelaskannya.

Eksplanasi individual, mengingatkan kita pada teori pendidikan yang membahas mengenai hubungan individu dengan keberhasilannya dalam pendidikan, yaitu (1) Nativisme yang mengatakan bahwa keberhasilan individu disebabkan oleh faktor bakat yang sudah dimilikinya. Pengasas teori ini adalah Schopenhauer, (2) Empirisme, memandang sebaliknya bahwa keberhasilan individu adalah disebabkan oleh faktor lingkungannya. Pengasas teori ini adalah John Locke, dan (3) Konvergensi, sebagai teori ketiga yang digagas oleh William Stern mengatakan bahwa keberhasilan individu disebabkan oleh faktor keduanya – bakat dan lingkungan yang mendorongnya.

Berbeda dari eksplanasi “naturalistik” dan “individualistik” di atas, semua teori sosiologi memiliki persamaan penekanan dalam hal keyakinan manusia dan tindakannya adalah produk pengaruh sosial. Ada tiga jenis teori sosial yang cukup penting untuk menjelaskan perilaku manusia dan kaitannya dengan dunia sosialnya, yaitu *konsensus*, *konflik*, dan *tindakan*. *Pertama*, teori *konsensus* berpendapat bahwa aturan-aturan kebudayaan suatu masyarakat, atau struktur, menentukan perilaku anggotanya, menyalurkan tindakan-tindakan mereka dengan cara-cara tertentu yang mungkin berbeda dari masyarakat yang lain. Para teoretisi konsensus menjelaskan perbedaan dalam perilaku dan sikap dalam konteks keberadaan pengaruh kebudayaan alternatif, karakteristik dari latar sosial, berbeda dengan eksplanasi teori individual yang menekankan pada aspek kualitas psikologi manusia di atas. Contoh yang baik dalam hal ini adalah pendekatan teori ini terhadap ketidaksetaraan pendidikan.

Hasil penelitian di bidang pendidikan menunjukkan, dengan kesimpulan eksplisit, bahwa pencapaian dalam pendidikan sangat kuat kaitannya dengan keanggotaan kelas sosial, gender, dan asal-usul etnik. Sebagai contoh, banyak sekali bukti yang menunjukkan bahwa anak-anak dari kelas buruh pekerja yang memiliki kecerdasan sama dengan anak-anak dari kelas menengah memiliki pencapaian jauh lebih rendah daripada anak-anak dari kelas menengah itu.

Untuk menjelaskan hal ini, teoretisi konsensus menghimpun konsep-konsep dalam pendekatan mereka mengenai kehidupan sosial—norma, nilai,

sosialisasi, dan kebudayaan. Dimulai dari asumsi dasar bahwa perilaku dan keyakinan disebabkan oleh sosialisasi ke dalam aturan-aturan khusus, eksplanasi mereka mengenai rendahnya pencapaian pendidikan anak-anak kelas pekerja berusaha mengidentifikasi; pertama, disebabkan pengaruh kebudayaan yang mengendalikan anak-anak kelas menengah mencapai sukses akademik. Kedua, pengaruh kebudayaan yang menjerumuskan anak-anak kelas pekerja ke dalam pencapaian yang sangat rendah.

Jadi jika disimpulkan akan berbunyi bahwa teori konsensus pada fakta kehidupan sosial adalah berbagai kelakuan merupakan produk dari berbagai pola sosialisasi. Teori konsensus juga mengatakan bahwa meski terdapat perbedaan kebudayaan di antara kelompok-kelompok masyarakat, akan terdapat sub-budaya dalam kesatuan besar kebudayaan, dalam semua masyarakat, konsensus itu selalu ada.

Teori konsensus mengatakan bahwa manusia berperilaku sedemikian karena mereka disosialisasikan ke dalam aturan-aturan kebudayaan. Hasilnya adalah konsensus mengenai bagaimana berpikiran dan berperilaku, yang mewujudkan dalam pola-pola dan keteraturan perilaku. *Kedua*, teori-teori *konflik* berpendapat bahwa kita seharusnya melihat peranan aturan-aturan kebudayaan dan proses sosialisasi dalam cara yang sangat berbeda. Jika teori konsensus berbasis pada pentingnya pengaruh kebudayaan—apa yang kita pelajari untuk diinginkan sebagai hasil dari sosialisasi. Sebaliknya, teori *konflik* menaruh perhatian lebih besar pada konflik yang melekat dalam hubungan antara kelompok-kelompok yang mengalami keuntungan pada

tidak setara dalam masyarakat dan berpendapat bahwa isi kebudayaan seharusnya dilihat sebagai cara atau sarana mengekalkan hubungan ketidaksetaraan itu.

Teori sosiologi yang ketiga—teori *tindakan*—berkembang dalam arah yang agak berlainan. Sama halnya dengan kedua teori di atas yang berusaha menjelaskan mengapa manusia dalam masyarakat berperilaku secara teratur, namun teori yang ketiga ini mengemukakan pendapat yang berbeda. Teori *tindakan* menekankan pentingnya kebutuhan untuk memusatkan perhatian pada kehidupan sosial tingkat mikro, cara individu berinteraksi sama lain dalam kondisi hubungan sosial secara individual, bukan tingkat makro yakni cara seluruh struktur masyarakat mempengaruhi perilaku individu. Mereka berpendapat bahwa kita tidak boleh berfikir tentang masyarakat sebagai struktur-struktur yang sudah ada yang tergantung pada interaksi individual. Bagi teori tindakan, masyarakat adalah hasil akhir dari interaksi manusia, bukan penyebab. Hanya dengan mengkaji bagaimana manusia dapat berinteraksi dapatlah kita memahami bagaimana keteraturan sosial diciptakan.

Sebagian tindakan manusia adalah tindakan yang kita temukan dalam dunia binatang—tidak bertujuan, atau kurang disadari. Kita semua melakukan sesuatu begitu saja (*involuntary*)—seperti bersin, mengejapkan mata, menguap, dan lain-lain. Kita juga tidak memilih untuk merasa takut, senang, atau menderita, atau memilih reaksi terhadap perasaan-perasaan itu. Sejauh yang kita ketahui, tindakan hewan yang bukan manusia sepenuhnya

instingtif (respon otomatis atau refleks terhadap stimuli eksternal). Bahkan penjelasan teori ahli zoologi, pola-pola kelakuan hewan ini terjadi begitu saja (*involuntary*). Mereka reaktif dan dikondisikan, bukan produk pengambilan keputusan kreatif yang suka rela (*voluntary*).

Sebaliknya, hampir semua tindakan manusia adalah sukarela (*voluntary*). Tindakan itu adalah produk dari suatu keputusan untuk bertindak, sebagai hasil dari pikiran. Hampir semua yang kita lakukan adalah hasil dari memilih tindakan dengan suatu cara tertentu bukan cara lain. Ini disebut pilihan purposif, atau berorientasi pada tujuan. Oleh karena itu, hampir semua tindakan manusia adalah tindakan yang disengaja; kita mewujudkan tindakan tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang dikehendaki. Dari mana maksud, atau tujuan yang dipilih itu datangnya? Teori tindakan menekankan bahwa kita memutuskan apa yang kita lakukan sesuai dengan *interpretasi* kita mengenai dunia sekeliling. Menjadi manusia berarti menjadikan masuk akal latar atau situasi di mana kita menemukan diri kita dan mewujudkan tindakan sesuai dengan situasi itu. Menggunakan teori tindakan untuk kepentingan ini berarti kita memilih apa yang dilakukan sesuai dengan "definisi situasi yang bersangkutan".

Kesimpulannya adalah sebagai berikut; kebalikan dari pandangan strukturalis, maka "realitas" sosial tidaklah faktual, objektif, dan tegas. Realitas hanya akan menjelma sesuai dengan apa yang dipikirkan pelaku yang terlibat dalam interaksi adalah nyata, dan apa yang mereka pikirkan nyata menentukan tindakan apa yang akan ia ambil. Oleh karena itu, realitas

hampir dipastikan adalah kreasi yang dinegosiasikan oleh individu-individu yang terlibat dalam interaksi satu sama lain. Selanjutnya, karena dunia sosial yang diciptakan itu tergantung pada interpretasi individu-individu tertentu dalam latar sosial tertentu, dunia sosial itu lebih merupakan konstruksi-konstruksi daripada konsep struktur sosial yang menentukan perilaku.

Dengan demikian, teori-teori konsensus, konflik, dan tindakan mengidentifikasi faktor-faktor signifikan yang berbeda dalam menjelaskan hakikat kehidupan sosial, dan tentang hubungan antara individu dan masyarakat.

Analisis Makro, Meso, dan Mikro

Di dalam realitas sosial yang terdiri atas struktur dan manusia yang berada dalam struktur – dalam konteks peran dan pengaruh masing-masing – dapat dianalisis dengan menggunakan tiga perspektif, makrostruktur, mesostruktur, dan mikrostruktur. Randal Collins (1988) dan William Skidmore (1979). Dalam bukunya yang berjudul "*Theoretical Sociology*", Collins mencoba memetakan teori sosiologi ke dalam tiga aras, yakni makro, meso, dan mikro. Menurutnya teori sosiologi aras makro merupakan teori yang topik kajiannya menempatkan waktu dan ruang mempunyai pengaruh terhadap manusia. Unit analisis dari sosiologi makro ini adalah masyarakat sebagai suatu sistem sosial. Adapun yang dimaksud Collins dalam teori

sosiologi makro ini adalah teori evolusi, teori sistem, teori fungsionalis, teori ekonomi politik, teori konflik, dan perubahan sosial.

Berbeda dengan teori sebelumnya, teori sosiologi aras meso muncul karena pertanyaan mendasar tentang hubungan timbang balik antara mikro dan makro teori. Dalam hal ini, teori sosiologi pada aras meso berusaha menjembatani antar teori makro dan mikro terutama yang berupa kontroversi. Adapun yang termasuk ke dalam teori ini adalah teori jaringan yang mana berusaha menghubungkan teori makro dan mikro melalui situasi dan struktur sosial dibandingkan dengan ciri-ciri individu. Selain itu, teori sosiologi yang masuk pada aras meso, meliputi: teori jaringan yang menjelaskan efek jaringan dari tindakan individu dan kepercayaannya, jaringan dan ekonomi, dan jaringan kekuasaan.

Sementara itu, teori sosiologi aras mikro merupakan teori yang memfokuskan pada topik kajian ruang dan waktu dalam ukuran yang lebih kecil dimana individu dan interaksinya yang didasari oleh perilaku dan kesadaran. Akan tetapi, Collins menambahkan bahwa unit mikro tidak memiliki batas yang jelas dengan mempertanyakan bagaimana keberadaan individu terhadap individu lain terhadap kelompoknya. Adapun yang termasuk ke dalam teori sosiologi mikro ini adalah teori ritual interaksi (Durkheim dan Goffman), teori status sosial (Goffman), dan teori pertukaran, dan teori relasi sosial.⁶

⁶Untuk kajian lebih luas, sebagai perbandingan dapat dikemukakan bahwa pemetaan teori sosiologi yang diungkapkan oleh Collins (1988), berbeda jauh dengan

Untuk memahaman mengenai ketiga aras atau analisis tersebut di atas, barangkali lebih dahulu kita memahami dua perspektif yang sangat berlawanan yaitu makrostruktur (struktur) dan mikrostruktur (individu). Perspektif makrostruktur menempatkan individu pada posisi tidak berdaya, lemah, dan terkungkung oleh struktur. Struktur sosial lebih mendominasi kehidupan individu. Individu tenggelam dalam kekuatan struktur sosial. Sebaliknya Perspektif mikro atau individu menempatkan individu sebagai aktor yang bebas dan kreatif dalam memaknai sosialnya. Struktur sosial tidak berdaya mengendalikan individu.

Perspektif makrostruktur bersumber pada pandangan Emile Durkheim. Dalam teorinya ia mempunyai pandangan konsensus yang agak ortodoks mengenai struktur sosial. Cirinya yang sangat penting, katanya, adalah bahwa struktur sosial itu terdiri dari norma-norma dan nilai-nilai—definisi

apa yang dikemukakan oleh Skidmore (1979). Menurut Skidmore bahwa tipe teori dalam sosiologi dapat dibedakan ke dalam tiga bagian, yakni: teori deduktif (*deductive theory*), teori berpola (*pattern theory*), dan perspektif (*perspective*). Teori deduktif merupakan teori yang dibangun dari tujuan yang bersifat umum tentang suatu subyek atau fenomena atau peristiwa yang meliputi hukum-hukum. Skidmore memberikan contoh bahwa setiap kejadian atau peristiwa X senantiasa mempengaruhi terjadinya kejadian atau peristiwa Y (sebab-akibat) atau sebaliknya. Tentunya kejadian atau peristiwa X maupun Y yang merupakan sebab-akibat tidak terjadi begitu saja, melainkan didasari oleh hukum atau teori yang ada sebelumnya. Teori ini, kemudian yang ditunkan dalam bentuk tujuan umum tentang subyek kumpulan hukum-hukum (proposisi-proposisi). Dari kumpulan hukum-hukum ini, kemudian menghasilkan apa yang dinamakan hipotesa. Berbeda dengan teori sebelumnya, teori berpola (*pattern theory*) tidak menekankan pada pemikiran teori deduktif, dimana dimensi vertikal tidak menjadi penting, melainkan logikanya didasarkan atas "lateral". Penekanan atas logika tersebut, mendorong teori ini lebih bertujuan menghubungkan pemikiran secara teori dengan realita yang ada. Atau dengan kata lain, teori ini lebih berdasarkan atas fakta sosial atau empirisme dalam membangun teorinya. Skidmore (1979) memberikan contoh teori ego dan super-ego yang dikemukakan oleh Sigmund Freud.

kebudayaan dari perilaku yang dianggap pantas dan penting dalam seting yang berbeda-beda. Adalah melalui sosialisasi kita mempelajari definisi-definisi normatif ini, hanya melalui proses ini yang membuat anggota-anggota masyarakat menjalankan kehidupan sosial mereka.

Menurut Durkheim, walau pun kita mungkin menganggap dapat memilih perilaku tertentu untuk berhadapan dengan orang lain, dalam realitasnya pilihan itu sebenarnya sudah disediakan untuk kita. Durkheim-lah yang pertama kali menekankan pandangan konsensus bahwa pikiran dan pengalaman sekali pun diwariskan, tidak ditemukan. Sebagai contoh, orang mengunjungi gereja untuk beribadah tentu percaya pada keesaan Tuhan. Keyakinan dan praktek keagamaan itu sudah ada jauh sebelum ia lahir ke dunia ini—artinya, mereka mempelajarinya. Seperti kegiatan sosial lainnya, keyakinan dan praktek agama distrukturkan oleh masyarakat dan oleh posisi orang-orang yang ada di dalamnya.⁷

Bagi Durkheim, pencapaian kehidupan sosial manusia dan eksistensi keteraturan sosial dalam masyarakat, yang ia sebut solidaritas sosial,

⁷Durkheim sendiri menegaskan hal ini, demikian mendasar bagi pandangan konsensus dalam kehidupan sosial sebagai berikut: Tatkala saya melaksanakan tugas-tugas saya sebagai saudara, suami atau warga negara dan melaksanakan komitmen tersebut, saya menjalankan kewajiban yang didefinisikan oleh aturan dan adat dan berada di luar diri saya dan tindakan saya. Sekali pun aturan dan adat itu sesuai dengan pikiran dan sentimen saya dan jika saya merasakan realitas itu dalam diri saya, realitas itu tidaklah obyektif, karena bukan saya yang menentukan kewajiban-kewajiban yang saya emban itu; saya menerimanya melalui pendidikan.....Sama pula halnya pemeluk agama mendapatkannya sejak lahir, sudah ada sebelumnya keyakinan dan praktek agama tersebut, dan terus hadir di luar dirinya. Durkheim dikutip Pip Jones, *Pengantar Teori-teori Sosial; Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-modernisme* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hal 44-45.

dimantapkan oleh sosialisasi—yang melalui proses tersebut manusia secara kolektif belajar standar-standar atau aturan-aturan perilaku. Istilah Durkheim untuk hal ini adalah “fakta sosial”. Meski fakta sosial ini hanya *dapat dilihat* melalui konformitas individu-individu kepadanya, fakta sosial itu menurut Durkheim berada “eksternal” dan “mengendalikan” individu-individu ini. Meski tidak dapat dilihat, struktur aturan-aturan kebudayaan itu nyata bagi individu-individu yang perilakunya ditentukan oleh fakta sosial itu seperti struktur fisik dunia yang juga menghambat individu-individu. Masyarakat menurut Durkheim adalah realitas *sui generis*—yakni masyarakat memiliki eksistensinya sendiri.

Di dalam pembahasannya mengenai ilmu tentang masyarakat, dalam konsepsinya tentang struktur sosial, mendorong Durkheim mendukung penggunaan ilmu pengetahuan (sains) untuk menjelaskan kehidupan sosial. Metode ilmiah yang dikembangkannya dikenal sebagai *positivisme*. Prinsip pemandu bagi ilmuwan positivis adalah bahwa jika sesuatu terjadi dalam alam, hal ini disebabkan oleh sesuatu yang lain dalam alam. Yakni, fenomena alam menyebabkan fenomena alam yang lain. Sebagai contoh, jika air mencapai temperatur tertentu (sebab) ia akan membeku (akibat). Hubungan sebab dan akibat yang pasti disebut *hukum*.

Bagi Durkheim, struktur sosial sama obyektifnya dengan alam itu sendiri. Menurut Durkheim, sifat struktural diberikan kepada warga masyarakat sejak mereka lahir, sama seperti yang diberikan alam kepada fenomena alam, yang hidup maupun tidak. Katak tidak memilih bermata besar dan mampu

melompat-lompat, air tidak memilih menjadi beku. Semua sudah terjadi dengan sendirinya. Manusia tidak memilih punya dua mata dan satu hidung, dan satu mulut. Juga tidak memilih mempunyai tangan dua dan kaki dua. Semua tidak lain adalah fakta biologis dari kehidupan.

Dengan cara yang sama, bagi Durkheim, suatu masyarakat terdiri dari realitas fakta *sosial* yang sama yang bersifat “eksternal dan menghambat” individu. Kita tidak memilih untuk meyakini sesuatu yang kini kita yakini atau memilih tindakan yang kita ambil sekarang. Kita belajar untuk berfikir atau melakukan semua itu.

Berbeda dengan pandangan di atas, perspektif mikrostruktur terutama didominasi oleh teori tindakan Max Weber dan para pengikutnya. Bagi Weber, dunia sebagaimana kita saksikan terwujud karena tindakan sosial. Manusia melakukan sesuatu karena mereka memutuskan untuk melakukan itu untuk mencapai apa yang mereka kehendaki. Setelah *memilih* sasaran, mereka memperhentikan keadaan, kemudian memilih tindakan. Jadi struktur sosial adalah produk (hasil) dari tindakan itu; cara hidup adalah produk pilihan yang dimotivasi. Weber menyebut metode yang dikembangkannya sebagai *verstehen*.

Menimbang Aspek Sosiologis dalam Epistemologi Tarjih

Memahami bahwa karakter manusia adalah sangat kompleks dan unik berhadapan dengan teks yang pasti (al-Qur'an dan as-Sunnah), maka yang kita lakukan adalah melakukan ijtihad sosial-budaya tanpa menghilangkan substansi (*core*) , inti, dan yang *esoterik* ajaran Islam itu sendiri dalam melakukan aktivitas bertarjih. Jika Islam itu mengandung dua hal yakni dimensi *esoterik-keimanan* dan *eksoterik-fiqhiah*, maka dimensi eksoterik berlaku mengikuti zaman (ruang) dan tempat. Landasan epistemologi yang tepat dalam menggali suatu keputusan hukum sangat dipengaruhi oleh ilmu yang secara interdisipliner berkembang dan kondisi zaman yang terus berubah. Dalam konteks teori-teori sosial yang memandang antara posisi struktur dan manusia berhadapan-hadapan sebagaimana perspektif Durkheimian dan Weberian di atas, telah dijumpai para teoretisi yang menggali jalan tengah untuk mengkomporomikan secara ilmiah dua jenis perspektif makro dan mikro di atas. Dari fenomena ini maka muncul perspektif mesostruktur untuk menganalisis timbal balik antara struktur dan manusia. Berkaitan dengan analisis mesostruktur, studi yang dilakukan oleh Thomas⁸ dikatakan bahwa perilaku manusia bukan hanya dikendalikan oleh struktur yang membatasi atau manusia bebas bergerak dan berkreasi dalam dunia sosialnya, tetapi bagi teoretisi penengah seperti ini menganggap bahwa wujud perilaku manusia adalah keputusan yang dipilihnya dan produk interaksinya terhadap lingkungan atau struktur yang dimaknai.

⁸Jim Thomas, "Some Aspects of Negotiated Order, Loose Coupling and Mesostrukture in Maximum Security Prison", *Symbolic Interaction* 7 (Fall), 1984: 213-231.

Realitas sosial adalah satu kesatuan yang dapat dirubah, diperbaiki, dan disempurnakan. Dalam analogi Strauss realitas kehidupan sosial ini sebagai “meja negosiasi”. Pada dasarnya masyarakat adalah sebuah “meja besar” yang bernama negosiasi⁹. Sifat negosiasi adalah kompromi-kompromi yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak (sesuatu) untuk mendapatkan suatu keputusan yang tepat. Dalam konteks kehidupan berislam, barangkali kita dapat mengilustrasikan hubungan antara Islam sebagai makrostruktur yang faktual dan Muslim sebagai pelaksana ajaran-ajaran Islam adalah proses negosiasi. Sifat negosiasi dalam konteks ini adalah tidak dalam bentuk siapa atau apa yang menang dan yang kalah. Tetapi bagaimana ajaran-ajaran Islam secara metodologis dan praktis dapat bersesuaian dengan konteksnya. Untuk keperluan bertarjih berarti upaya-upaya pengembangan epistemologi tarjih.

Dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam, problem Islam—juga dikatakan sebagai kekayaan Islam—adalah terletak pada perbedaan-perbedaan pandangan dalam tubuh umat Islam, terutama di kalangan para ulama. Perbedaan ini disebabkan antara lain karena persepsi dan kapasitas keilmuan yang dikuasai. Inilah yang kemudian melahirkan sosok yang berbeda, ekstrem dan moderat. Dalam sejarah pelaksanaan politik Islam, misalnya, terbagi menjadi dua kelompok pandangan mengenai pengertian politik Islam, yaitu kelompok ulama klasik dan kontemporer. Padahal di dalam definisi mereka terdapat kata-kata yang secara substantif memiliki

⁹ Anselm Strauss, *Negotiations; Varieties, Process, Contexts, and Social Order* (San Francisco: Jossey-Bass, 1978).

makna yang sama. Contoh, inti politik Islam adalah persoalan operasional “tindakan”. Para ulama mengekspresikan maksud tindakan itu dengan kata-kata yang berbeda seperti, *tasarrufat; tadbir, fi'l; ishlah; istislah; hiyatah; taghliz*.¹⁰ Dari perbedaan istilah-istilah untuk mengganti kata tindakan seperti inilah maka melahirkan tiga macam konsep politik Islam menjadi tiga penekanan yaitu; *Pertama*, politik Islam (*siasah Syar'iyah*) merupakan metode atau kaidah pemerintahan atau pentadbiran negara berlandaskan ajaran Islam. Ia dikenal sebagai metode atau mekanisme hukum Islam yang

¹⁰Istilah-istilah tersebut memiliki makna yang berbeda tetapi substansinya sama sebagaimana dalam penjelasan berikut:

Pertama, tasarrufat bermakna tindakan yang digunakan oleh Rizq al-Zalbani. Lihat Rizq al-Zalbani, *Mudhakkirah fi al-Siasah al-Syar'iyah* (Kairo: Jami'ah al-Azhar, Mathba'ah al-Syarq, tt);

Kedua, tadbir, fi'il bermakna pentadbiran, digunakan oleh Abd. Wahab Khallaf. Lihat: Abd. Wahab Khallaf, *al-Siasah al-Syar'iyah wa Nizam al-Islamiyyah fi al-Syu un al-Dusturiyyah, wa al-Kharijiyyah wa al-Maliyyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987), hal. 7. Hal ini, digunakan juga oleh Duraini. Lihat Fathi Ahmad al-Duraini, *Khasa'is al-Tasyri' al-Islamiy fi al-Siasah wa al-Hukm* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987), hal. 412., dan juga Mohammad Na'im Yasin. Lihat Muhammad Na'im Yasin, *Siasah Syar'iyah* untuk pelajar (mahasiswa) Ph.D. Syari'ah, Universiti Jordan sesi Pengajian 1992/1993;

Ketiga, ishlah berarti perbuatan atau tindakan, digunakan oleh Ibn Aqil. Lihat Ibn Qayyim, *al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siasah al-Syar'iyah* (tt: tp, 1995), hal. 11, digunakan juga oleh Ibn Nujaim. Lihat: Ibn Nujaim, *al-Bahr al-Ra'iq Syarh Kanz al-Daqa'iq*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiy, tt), hal. 11, dan juga oleh Abd al-Al Utwah. Lihat Abd al-Al Utwah, *al-Madkhal. ila al-Siasah al-Syar'iyah* (Riyad, tp, 1993), hal. 44;

Keempat, istislah berarti melakukan tindakan yang mendatangkan kebaikan, digunakan oleh Ibn Abidin. Lihat Ibn Abidin, *Hasyiyah Radd al-Muhtar ala al-Durr al-Mukhtar*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hal. 15;

Kelima, hiyatah berarti menguasai dan memerintah, digunakan oleh al-Nasafiy. Lihat Al-Nasafiy, *Tilbah al-Talabah fi al-Istilahat al-Fiqhiyyah* (Bagdad: Maktabah al-Mathanna, 1311 H), hal. 167. *Keenam, taghliz* berarti tindakan menggandakan dan memberatkan hukuman yang ada, digunakan oleh Ibn Abidin. Lihat Ibn Abidin, *Hasyiyah Radd al-Muhtar ala al-Durr al-Mukhtar*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hal. 15.

diharuskan kepada pihak kerajaan Islam atau kelompok Islam untuk menggunakannya untuk menangani atau menyelesaikan masalah-masalah baru yang tidak dijelaskan oleh nash-nash secara langsung. *Kedua*, Pemakaian Siasah Syar'iyah adalah tunduk kepada syarat-syarat dan garis panduannya. Ini bertujuan supaya mandat dan keharusannya tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu sehingga menimbulkan fitnah. *Ketiga*, Pada dasarnya tidak ada pertentangan mengenai konsep Siasah Syar'iyah di kalangan para ulama. Yang ada adalah sekedar perbedaan dari segi skop pemakaian saja. Ada yang umum dan ada yang khusus. Siasah Syar'iyah dipakai secara khusus dalam masalah yang memerlukan ijtihad. Sedangkan pemakaian secara umum meliputi seluruh ruang lingkup pentadbiran dan pengurusan negara yang melibatkan nash dan ijtihad.

**Ilustrasi Analisis Sosiologi Makro, Meso dan, Mikro terhadap
Muhammadiyah: Majelis Tarjih dan Hubungannya dengan Peran
Partisipannya.**

Muhammadiyah (Majelis Tarjih) adalah sebuah struktur, fakta sosial yang di dalamnya terhimpun para ahli dalam bidang pemikiran Islam. Sebagai organisasi yang dilahirkan memiliki visi dan misi, maka para partisipan harus tunduk pada visi dan misi organisasi. Konsekuensinya adalah para tenaga ahlinya harus merasa terikat, dikendalikan, dan dibatasi gerak dan kretifitasnya termasuk dalam mengemukakan pendapat atau maksud apa saja

tidak boleh berlawanan dengan aturan yang berlaku di dalam organisasi. Jika ia berbeda, maka ia dianggap berlawanan dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai realitas fakta *sosial* yang bersifat “eksternal dan mengendalikan” partisipan.

Jika Majelis Tarjih adalah sama dengan Muhammadiyah sebagai struktur sosial yang memiliki ketentuan-ketentuan, panduan-panduan dalam kerja-kerja ketarjihannya yang tidak dapat diubah dan memiliki “pakem” berupa metodologi tertentu, maka para partisipan tidak dapat memilih atau melakukan perubahan-perubahan cara dan metode bertarjih. Partisipan hanya dapat mempelajari dan mewarisi cara-cara yang digunakan oleh para pendahulunya.

Dalam perspektif paradigma fakta sosial (Emile Durkheim) kita tidak memilih untuk meyakini sesuatu yang kini kita yakini atau memilih tindakan yang kita ambil. Kita belajar untuk berfikir atau melakukan semua itu. Dalam konteks ini, Muhammadiyah adalah makrostruktur lepas apakah para partisipan suka atau tidak suka. Partisipan dikendalikan oleh struktur yang bernama Muhammadiyah.

Berbeda dengan analisis makro di atas, banyak orang melihat kebesaran Muhammadiyah disebabkan oleh para partisipan yang ada di dalamnya senantiasa melakukan kreativitas dan kerja-kerja untuk membesarkan organisasinya. Bagaimana para partisipan bertindak, memikirkan, memilih untuk bertindak menyebabkan organisasi ini menjadi besar dan terus

berkembang. Jadi Muhammadiyah (kebesaran Muhammadiyah sebagai struktur sosial) adalah produk (hasil) dari tindakan-tindakan para partisipannya itu; cara ber-muhammadiyah adalah produk pilihan yang dimotivasi. Dinamika Majelis Tarjih akan tergantung cara kerja para ahli di dalamnya bertarjih. Dalam menggairahkan dan mengembangkan cara-cara bertarjih, para ahlinya bebas berkreasi dengan menggunakan metode-metode yang berkembang, pilihan-pilihan epistemologi dan menggunakan pendekatan interdisipliner—memandang penting ilmu-ilmu yang relevan seperti sosiologi, antropologi budaya, ekonomi, politik, psikologi dan lain sebagainya, wawasan global dan kontekstual—adalah sangat diperlukan untuk mengangkat citra kerja dan ketepatan dalam melakukan kegiatan ketarjihannya zaman sekarang ini.

Analisis ketiga adalah adanya penilaian bahwa fenomena Muhammadiyah adalah produk interaktif yang dipersepsikan sebagai organisasi modern dan progresif dengan para partisipan yang selalu berupaya menjadikan organisasi ini terus berkibar. Fanatisme ber-muhammadiyah melahirkan sosok yang berani berkorban demi kebesaran Muhammadiyah. Terhadap orang seperti ini Muhammadiyah adalah “citra” yang cukup berarti dalam hidup dan status sosialnya. Metode dan hasil keputusan hukum apa pun yang dilakukan oleh Majelis Tarjih misalnya, adalah dipandang lebih shaheh dan akurat dibanding cara-cara yang dilakukan oleh organisasi lainnya karena dilakukan dengan cara-cara modern dengan pendekatan-pendekatan interdisipliner dan bersifat kontemporer oleh para tenaga-tenaga ahlinya di

Muhammadiyah. Hubungan antara Muhammadiyah dan partisipannya adalah hubungan saling melindungi, menjaga, dan saling memerlukan.

Tema-tema berikut menjadi relevan dengan analisis meso ini yakni ketika Majelis Tarjih Jawa Timur melakukan seminar dan rakerwil pada tahun 2011 mengangkat tema-tema, "*Mewujudkan Majelis Tarjih yang Responsif Terhadap Persoalan Kekinian Umat; Pemantapan manhaj Tarjih sebagai dasar Istinbat Hukum Persoalan Kekinian*", dan Musyawarah Nasional tahun 2010, bertema "*Tajdid Muhammadiyah pada Abad Kedua Puluh Satu*". Tema-tema tersebut merupakan wujud interaksi partisipan terhadap upaya mempertahankan "citra" Muhammadiyah sebagai gerakan modern yang dibanggakan. Hubungan antara Muhammadiyah dan partisipannya adalah sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Max Weber "*what we think existence depends on what we think essential*" (apa yang kita pikir eksis tergantung pada apa yang kita pikir esensial).

Ayat-ayat yang saya kemukakan untuk mengawali makalah ini pada halaman pertama di atas, meskipun tidak persis sama dengan fenomena sosiologis, menggambarkan kerja ketiga aras analisis ini.

Wallahu a'lam

Bibliografi

Comte, August, *A Discourse on the Positive Spirit*, London: William Reeves, 1903.

Al-Duraini, Fathi Ahmad, *Khasa'is al-Tasyri' al-Islamiy fi al-Siasah wa al-Hukm*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987.

Ibn Abidin, Muhammad Amin, *Hasyiyah Radd al-Muhtar ala al-Durr al-Mukhtar*, Juz 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Ibn Nujaim, Ibn Nujaim Zainuddin, *al-Bahr al-Ra'iq Syarh Kanz al-Daqa'iq*, Juz 5, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiy, tt.

Irwan, Alexander, "Pengantar," dalam Immanuel Wallerstein, *Open The Social Science; Report of the Gulbenkian Commission on the Restructuring of the Social Science*, diterjemahkan Oscar, Yogyakarta: Lintas Batas Ilmu Sosial dan LkiS, 1997.

al-Jawziyyah, Ibnu Al-Qayyim, *Al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siasah al-Syar'iyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.

Jones, Pip, *Pengantar Teori-teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-modernisme*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.

Khallaf, Abd al-Wahab, *al-Siasah al-Syar'iyah wa Nizam al-Islamiyyah fi al-Syun al-Dusturiyyah, wa al-Kharijiyyah wa al-Maliyyah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987.

Mill, John Stuart, *A System of Logic Ratiocinative and Introductive*, vol. 8 of *Collected Works of John Stuart Mill*, Toronto: University of Toronto Press, 1974. Buku 6, bab 3, alenia 2.

Al-Nasafiy, Najamuddin Ibn Hafs, *Tilbah al-Talabah fi al-Istilahat al-Fiqhiyyah*, Bagdad: Maktabah al-Mathanna, 1311 H.

Strauss, Anselm, *Negotiations; Varieties, Process, Contexts, and Social Order*, San Francisco: Jossey-Bass, 1978.

Suwarno dan Alvin Y.So, *Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1991.

Thomas, Jim, "Some Aspects of Negotiated Order, Loose Coupling and Mesostruktire in Maximum Security Prison", *Symbolic Interaction* 7 (Fall), 1984: 213-231.

Al-Utwah, Abd., *al-Madkhal. ila al-Siasah al-Syar'iyah*, Riyad: tp, 1993.

Wallerstein, Immanuel, *Open The Social Science; Report of the Gulbenkian Commission on the Restructuring of the Social Science*, diterjemahkan Oscar, Yogyakarta: Lintas Batas Ilmu Sosial dan LkiS, 1997.

Wallerstein, Immanuel, "World-System Analysis," dalam Anthony Giddens dan Jonathan H. Turner (ed.), *Social Theory Today*, Stanford: Stanford University Press, 1987.

Yasin, Muhammad Na'im, dalam Catatan *Siasah Syar'iyah* untuk pelajar (mahasiswa) Ph.D. Syari'ah, Universiti Jordan sesi Pnegajian 1992/1993.

Al-Zalbani, Rizq, *Mudhakkirah fi al-Siasah al-Syar'iyah*, Jami'ah al-Azhar: Mathba'ah al-Syarq, tt.